



KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKARAKTER DALAM MENGATASI ANCAMAN ETNOSENTRIS AKIBAT DARI PEMEKARAN WILAYAH

Didik Iskandar^{1*)}, Encep Syaripudin², Cucu Atikah³

^{1,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia
didik.iska@gmail.com

Universitas Islam Negeri Banten, Banten, Indonesia
778220014@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia
cucuatikah@untirta.ac.id

ABSTRAK

Pemekaran daerah dilakukan lebih banyak karena kepentingan politik. Persinggungan etnik dengan kekuasaan kerap terjadi akibat pemekaran wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Urgensi kebijakan Pendidikan berkrakter dalam mengatasi ancaman etnosentris akibat dari pemekaran wilayah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berkrakter di Wilayah Pemekaran sangat penting untuk mengurai berbagai problem yang mengiringi pelaksanaan pemekaran wilayah yang syarat politik dan berpotensi konflik. Kebijakan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyakan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa agama yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan, Pemekaran wilayah, Etnosentrisme.

ABSTRACT

Regional expansion is carried out more because of political interests. The intersection of ethnicity and power often occurs as a result of regional expansion. The aim of this research is to analyze the urgency of character education policies in overcoming ethnocentric threats resulting from regional expansion. This research method is descriptive qualitative with data collection through literature study. The results of the research show that character education policies in Expansion Areas are very important to unravel the various problems that accompany the implementation of regional expansion which require political conditions and have the potential for conflict. It is hoped that the multicultural education policy will provide resilience and flexibility in the nation's mentality in facing social conflicts, so that national unity is not easily broken or fractured. Multicultural education is very strategic in being able to manage diversity creatively, so that social conflicts and violence with religious nuances that arise as a result of social transformation and reform can be managed intelligently and become part of the enlightenment of the nation's life in the future.

Keywords: Education Policy, Regional Expansion, Ethnocentrism.

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan topik yang banyak diperbincangkan dalam lingkaran pendidikan saat ini. Pendidikan merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat aturan dan prosedur yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Setiap siswa memiliki tanggung jawab

yang sama terhadap proses pembelajaran. Pendidikan merupakan pilar utama untuk memajukan perkembangan intelektual anak-anak generasi penerus bangsa. Perkembangan intelektual ini nantinya akan membentuk tabiat atau karakter anak, dan karakter yang ada pada diri anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penyebab internal dipengaruhi oleh keadaan psikologis anak dan lingkungan keluarga, sedangkan penyebab eksternal dipengaruhi oleh interaksi anak. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pembentukan karakter anak. Karakter yang dimiliki anak dapat menentukan mentalitasnya ketika melakukan perilaku tertentu dalam kehidupan sehari-hari (Awaru, 2017). Lembaga pendidikan merupakan tempat penanaman pendidikan akhlak agar karakter bangsa dapat tercermin dari kualitas peserta didik yang dihasilkan di sekolah tersebut. Ada dua macam nilai dalam hidup, moral dan non moral. Seseorang diizinkan untuk mengikuti prinsip-prinsip non-moral karena prinsip-prinsip tersebut adalah kesukaan mereka dan tidak mengakibatkan kerugian jangka panjang. Contoh nilai non-moral dalam tindakan adalah suka dan tidak suka pada suatu hal. (Syamsudin, 2012). Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab dan keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Program pendidikan moral yang berlandaskan hukum moral dapat diimplementasikan dalam dua nilai moral utama, yaitu rasa hormat dan tanggung jawab.

Nilai-nilai ini mewakili moral dasar penerapan universal. Mereka memiliki cita-cita, nilai-nilai yang nyata, yang mengandung nilai-nilai kebaikan bagi setiap orang secara pribadi dan masyarakat. Nilai-nilai rasa hormat dan tanggung jawab ini diperlukan untuk mengembangkan karakter yang baik. Orang dengan sifat yang sering dipuji bisa sangat berbeda satu sama lain. Juga, Indonesia dikenal luas sebagai negara yang terdiri dari 300 kelompok etnis yang berbeda. Semua keragaman ini telah terintegrasi dengan erat ke dalam ikatan Indonesia. Keragaman ras telah lama menjadi aset utama yang menyatukan orang. Kini, seiring menguatnya sentimen regional, fondasi keragaman mulai terancam. Ada masalah mendasar dengan ras yang begitu kuat yang dapat menyebabkan munculnya etnosentrisme. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan struktur masyarakat yang religius dan berbudaya. Sebagai negara kesatuan dengan keragaman budaya yang berbeda-beda, bentuk sistem pemerintahan desentralisasi merupakan salah satu alat pemersatu antar daerah. Namun banyaknya konflik yang muncul di tingkat daerah memungkinkan bentuk pemerintahan ini memberikan ketimpangan dan ketidakadilan sebagai dasar munculnya konflik (Kambo, 2015).

Pasca pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, sentimen daerah yang berkedok nasionalisme semakin terasa. Banyak daerah mengusulkan pemerintahan sendiri melalui pertimbangan ketat batas-batas nasional dan sub-etnis yang lebih kecil. Dengan demikian, hasil dari ekspansi sosial adalah dominasi oleh kelompok etnis tertentu. Beberapa daerah hasil pemekaran juga diberi nama yang mengacu pada nama etnik. Misalnya di Sumatera Utara, ada Kabupaten PakPak Bharat yang merupakan hasil pemekaran Dairi tahun 2003, dan biasanya diperintah oleh suku PakPak. Meskipun Kabupaten Nias didominasi oleh etnis Nias, kini juga berkembang dengan nama Nan Nias. Cynias dan Nias Utara. Di Aceh terdapat Kabupaten Gayo Lues yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara yang didominasi oleh suku Gayo. Di Provinsi Gorontalo terdapat suku Gorontalo, sedangkan suku Biak merupakan suku induk di Kabupaten Biak (Arifin, 2016). Pada dasarnya pemekaran daerah bukan karena persoalan perlakuan tidak adil terhadap suku bangsa, melainkan karena kepentingan politik. Keterkaitan antara etnis dan kekuasaan terlihat ketika begitu banyak kelompok atau organisasi yang memiliki kepekaan nasional mendukung pencalonan kepala negara dan anggota legislatif. Kelompok ini juga eksis untuk kepentingan jangka pendek dan merebut kekuasaan. Tidak dapat dipungkiri

bahwa segala sesuatu diorientasikan oleh kekuasaan dan kepentingan. Seiring berlalunya dekade, perbedaan rasial menjadi masalah baru. Dalam masa otonomi daerah saat ini, suatu daerah semakin terpecah belah dan bersengketa. Konflik Sambas di Kalimantan Barat dan konflik Sampit di Kalimantan Tengah menggarisbawahi adanya persoalan-persoalan tersebut yang gamblang dan menjadi masalah nasional.

Oleh karena itu perlu kiranya dibangun kesadaran tentang multikultural pada masyarakat kita agar tidak mudah terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Ideologi multikultural perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak kita sehingga karakter kebangsaan yang dimiliki oleh generasi penerus kita kuat. Karena indikator akan terjadinya perpecahan pada bangsa kita secara transparan sudah bisa kita baca. Hasil penelitian (Asnani et al., 2020; Fikri et al., 2023; Giantara & Amiliya, 2021; Suraya, 2017; M. C. Syahputra & Maida, 2021) menunjukkan bahwa dengan kesadaran multikultural diharapkan mampu mengurangi konflik-konflik dan tanda-tanda kehancuran bangsa tersebut. Akan tetapi Membangun kesadaran tentang multikultural bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerja keras dan tekad yang kuat untuk mampu mewujudkannya. Salah satu solusinya adalah dengan menghadirkan multikulturalisme disekolah melalui pendidikan multikultural. Dengan pendidikan multikultural disekolah diharapkan karakter kebangsaan siswa bisa terbangun sejak dini. Minimal mampu membangun kesadaran akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural.

Urgensi Kebijakan Publik

Melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (2010) sebagai berikut: “Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan”. Suharno (2019) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

1. Alasan Ilmiah, Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.
2. Alasan profesional, Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.



3. Alasan Politik, Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula (Nurany et al., 2021).

Pendidikan Berkarakter

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik (Omeri, 2021). Dalam lingkungan kontemporer, pendidikan berkarakter sangat penting untuk menyelesaikan masalah moral. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba, korupsi yang meluas, dan pergaulan bebas adalah ciri khas dari krisis moral ini, yang belum dapat diatasi secara total oleh para pembuat kebijakan pemerintah. (Rofi'ie, 2017). Proses pendidikan berkarakter harus dimulai sejak dini dan dioptimalkan untuk siswa di sekolah dasar. Sejak lahir, manusia telah memiliki potensi yang baik, namun potensi tersebut harus terus dikembangkan dan dipupuk melalui sosialisasi dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. (Lestari & Handayani, 2023). Menurut Widisuseno (dalam Rofi'ie, 2017) mengatakan bahwa pengembangan prinsip-prinsip luhur yang diambil dari budaya Indonesia merupakan pendidikan berkarakter dalam konteks pendidikan Indonesia. Prinsip dasar dari pendidikan karakter adalah penggalan prinsip-prinsip moral dari agama yang dapat diterapkan untuk semua orang.

Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan implikasi dari penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana amanah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi pemekaran wilayah sebagai suatu bentuk percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak selalu memberikan dampak positif tetapi tidak juga negatif terhadap perekonomian wilayah. Praktikno (2017) dalam Ratnawati (2019) mengatakan bahwa pemekaran wilayah memiliki "wajah ganda", yaitu ada sisi positif dan sisi negatif. Manfaat dan kerugiannya sangat tergantung pada sudut pandang siapa, baik pemerintah daerah ataupun pusat. Jika dari sudut pandang daerah, pemekaran wilayah memberikan dampak positif bagi perkembangan percepatan pembangunan (Nugroho, 2021), namun dari sudut pandang pemerintah pusat, pemekaran wilayah justru banyak mengalami kegagalan dalam implementasinya (Bappenas dan UNDP, 2018). Di balik berbagai permasalahan yang ditimbulkan tersebut, pemekaran wilayah juga menghasilkan hal yang positif bagi daerah, seperti Kabupaten Jembrana dengan pembebasan biaya sekolah untuk sekolah negeri, pemberian beasiswa dari SD-SMA, dan asuransi kesehatan masyarakat.

Ancaman Etnosentris



Etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk berfikir bahwa budaya etniknya lebih unggul dibandingkan dengan budaya etnik lain. Segala sudut sesuatu dilihat dari sudut pandang etniknya sendiri (Irianto, 2021). Etnosentrisme kian menguat justru ditopang dengan kebijakan negara yang mengembangkan otonomi daerah dan pemekaran daerah. Semangat otonomi daerah dan pemekaran daerah menjadi berjalan seiring dengan menguatnya etnosentrisme (Irianto, 2021). Sebagai contoh, Setiap provinsi dan setiap kabupaten ingin mendirikan sekolah sendiri baik pada tingkat dasar, tingkat menengah, bahkan pada tingkat perguruan tinggi. Para siswa dan bahkan para mahasiswa yang belajar praktis berasal dari daerah yang sama dan juga dari latar belakang budaya yang sama. Hal ini dalam jangka panjang bukannya tak mungkin akan menyebabkan menyempitnya rasa integrasi nasional, karena integrasi cenderung lebih didasarkan pada faktor-faktor etnis dan faktor daerah semata. Pendirian sekolah di masing-masing daerah tidak dalam kapasitasnya untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di wilayah tersebut, tetapi justru lebih pada semangat menyelamatkan asset daerah dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut (Hamri et al., 2016)

METODE

Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dianggap berasal dari masalah sosial (Sugiyono, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan dokumentasi untuk menghimpun informasi yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan metode kepustakaan (study literature) yaitu merupakan suatu metode pengumpulan data dengan berdasarkan buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh maka peneliti melakukan analisis data melalui strategi analisa data kualitatif. Penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian (Sugiyono, 2019). Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis data melalui reduksi data kemudian peneliti melakukan penyajian data dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan data senantiasa diuji sebab data yang berlangsung di lapangan akan mengalami perkembangan. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan akan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penulis melakukan uji keabsahan hasil penelitian dengan melakukan triangulasi sumber data dengan mengacu kepada Denzin (2010) maka pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan data akan memanfaatkan sumber, metode dan teori.

PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. "Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen "aneka ragam" (Kusumohamidjojo, 2020) Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.000 pulau yang membentang 3.000 mil dari timur ke barat, ditandai dengan daerah yang signifikan, etnis, agama, dan keberagaman bahasa (Fitria dkk, 2019). Melihat kondisi Indonesia yang multikultural membuat masyarakatnya hidup dalam keberagaman. SARA (suku, agama, ras,



dan antargolongan) sering menjadikan adanya gesekan, silang budaya antara satu suku atau agama dengan suku atau agama yang lain (ADI Utami, Wartyo & Sariyatun, 2018). Oleh karena itu suatu masyarakat membutuhkan pendidikan nilai baik untuk sikap penyelamatan maupun perbaikan untuk tetap bersatu di dalamnya dan untuk maju bersama dalam menyesuaikan dan mendukung kehidupan dan perkembangan manusia sebagai bagian dari masyarakat tersebut (Awaru, 2017; Nurany et al., 2021; Omeri, 2021; M. A. D. Syahputra, 2020). Peranan sekolah sebagai tempat pendidikan moral menjadi semakin penting ketika jutaan anak-anak hanya mendapatkan sedikit pendidikan moral dari orang tua mereka dan ketika makna nilai yang sangat berpengaruh yang di dapatkan melalui tempat ibadah lainnya perlahan tidak menghilang dari kehidupan mereka. Pada masa ini ketika sekolah tidak memberikan pendidikan moral, pengaruh kekerasan terhadap karakter anak-anak begitu cepat masuk dan membuat nilai-nilai yang berlaku menjadi vakum. Munculnya konflik di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dasar menyangkut etika. Tentunya, keragaman tersebut tidak mampu membentuk suatu komunitas, kecuali berdasar pada kesamaan nilai yang mereka miliki, seperti keadilan, kejujuran, sosial, demokratis dan penghargaan tinggi terhadap nilai kebenaran.

Perjalanan dan perkembangannya bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman agama, budaya, suku, dan bahasa, ditambah lagi dampak dari pemekaran wilayah tidak lagi membutuhkan konsep pendidikan monokultural eksklusif dan diskriminatif (Bikhu Parekh 2022). Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, Indonesia sangat membutuhkan perdamaian, keadilan, persamaan, dan seterusnya yang merupakan unsur yang dapat dilahirkan oleh pendidikan multikultural. Tetapi, patut dicatat bahwa akhir-akhir ini yang terjadi justru jauh dari harapan kemanusiaan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, keharmonisan, keamanan, perdamaian, dan persaudaraan. Dengan kata lain, diskriminasi, konflik sosial agama, krisis politik, ekonomi, budaya dan pendidikan, semakin menggurita di negeri ini. Salah satu persoalan penting yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana solusi agar problem-problem tersebut dapat diminimalisir. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak (Musa Asy'arie, Kompas, 2013). Dalam konteks global dan nasional, yang dikenal dengan muatan yang sangat majemuk, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa agama yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, masyarakat dan bangsa, maka pendidikan harus ditumbuh kembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di negeri ini. Meskipun pembaharuan (transformasi) dilakukan secara terus menerus tetapi upaya itu tidak akan memiliki ujung akhir karena persoalan pendidikan selalu ada selama peradaban dan kehidupan manusia itu masih ada. Kebijakan Publik dalam mentransformasi pendidikan sangat penting dalam menghasilkan Pendidikan berkarakter sebagaimana dikatakan oleh para pakar, dapat dilakukan melalui proses sebagaimana H.A.R. Tilaar, (2022) melalui:

1. Desentralisasi pendidikan merupakan usaha untuk:
 - a. membangun masyarakat demokratis,
 - b. pengembangan social capital, dan
 - c. pengembangan daya saing
2. Proses bipolar antara lokalisasi dan nasionalisme/globalisasi.

3. Transformasi pendidikan melalui pendidikan demokratis (Zamroni, 2021).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. Desentralisasi pendidikan adalah untuk membangun masyarakat demokratis yaitu masyarakat yang ditandai oleh: pengakuan akan hak asasi manusia, masyarakat terbuka dan bertanggung jawab, memiliki pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*) dan mengakui adanya perbedaan.
2. Sedangkan masyarakat bipolar antara lokal dan nasional/ global adalah proses pembudayaan dan menjadikan nilai dan budaya masyarakat sebagai pemersatu cita-cita pendidikan dan
3. Pendidikan demokratis adalah pendidikan yang mengutamakan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. kurikulum yang disampaikan harus berisi pesan-pesan yang bermakna,
 - b. bahan pengajaran sebagaimana aspek pertama disamping bersifat teoritis tapi dipadukan dengan isu-isu yang ada di masyarakat,
 - c. perlunya pelayanan pembelajaran yang optimal,
 - d. diselenggarakannya pendidikan ekstra kurikuler dengan tujuan yang lebih jelas,
4. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan,
5. Penyelenggaraan pendidikan secara simulatif dengan kenyataan yang ada di masyarakat

SIMPULAN

Percepatan kebijakan pendidikan berkarakter di wilayah pemekaran untuk konteks Indonesia adalah keniscayaan. Kebijakan ini diharapkan akan mampu mengurai berbagai problem yang mengiringi pelaksanaan pemekaran wilayah yang syarat politik dan berpotensi konflik. Pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Dalam konteks global dan nasional, yang dikenal dengan muatan yang sangat majemuk, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa etnosentris yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan. Rekomendasi yang tepat dalam tulisan sederhana ini, yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara konsisten memperhatikan masifnya perumusan kebijakan pendidikan karakter yang bisa menjadi unsur penting dalam mengurai berbagai macam intrik yang berpotensi memecah belah persatuan Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 439–460.
- Asnani, A., Mislia, M., & Susiana, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Mappesona*.
- Awaru, A. O. T. (2017). Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Berbasis Multikultural Di Sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 221–230.
- Fikri, S. H., Raman, W., Rangga, W., & Laila, E. (2023). *Urgensi pelaksanaan pendidikan karakter yang terintegrasi: analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter Pendahuluan*. 01(01), 45–56.
- Giantara, F., & Amiliya, R. (2021). Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 86–

96.

- Hamri, E., Putri, E. I. K., Siregar, H. J., & Bratakusumah, D. S. (2016). Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 111. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.412>
- Irianto, A. M. (2021). Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 18(1), 1–7.
- Kambo, G. A. (2015). Etnisitas dalam Otonomi Daerah. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 1–8.
- Lestari, I., & Handayani, N. (2023). Pentingnya Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Khususnya Sma/Smk Di Zaman Serba Digital. *Guru Pencerah Semesta*, 1(2), 101–109. <https://doi.org/10.56983/gps.v1i2.606>
- Nurany, A. L. D., Rosyid, M. A., Putri, C. J., Juwanti, A. E., & Ramadhan, N. F. (2021). Konsep Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Pandangan Islam. *EDISI : Jurnal Edukasi Dan Sains*, 3(2), 210–224.
- Omeri, N. (2021). PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 161. <https://doi.org/10.25157/j-kip.v2i3.6156>
- Rofi'ie, A. H. (2017). Pendidikan Karakter Adalah Sebuah Keharusan. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 1(1), 113–128. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2017.001.01.7>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suraya, S. (2017). Mempertahankan Integrasi Nasional Dengan Komunikasi Antar Budaya. *Sociae Polites*, 15(1), 37–56. <https://doi.org/10.33541/sp.v15i1.439>
- Syahputra, M. A. D. (2020). Peranan Pendidikan IPS dalam Pencegahan Konflik Melalui Pendidikan Perdamaian. *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.23887/pips.v4i1.3036>
- Syahputra, M. C., & Maida, N. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter: Dari Kebijakan Publik Untuk Kebajikan Publik. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1), 25–39. <https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.9611>
- Syamsudin, A. (2012). Pengembangan Nilai Nilai Agama Dan Moral Pada Anak Usia Dini. In *Jurnal Pendidikan Anak* (Vol. 1).